EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU OLEH GAKUMDU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Nina Yuliawati

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung, Indonesia
email: ambuinom@yahoo.co.id

Abstract

Elections are a tangible form of the concept of democracy, as one of the principles of governance in Indonesia. But in the implementation of the democratic party there are still shortcomings. Some of the highlights are the rise of money politics in every election from village head elections to presidential elections. One of the factors causing the rise of money politics is due to the lack of awareness from most Indonesians that elections are the most effective vehicle for the enforcement of people's sovereignty. It is categorized as an electoral crime whose threat of sanctions has been assertive. In Law No. 7 of 2017 on Elections shows the seriousness of the government in eradicating electoral crimes through the formation of Gakkumdu. Gakkumdu as an integrated law enforcement center has an important role in the handling of electoral crimes. In Article 486 point (1) law No. 7 of 2017 explicitly explained the establishment of Gakkumdu intends to equate the understanding and pattern of handling election crimes by Bawaslu, the State Police of the Republic of Indonesia, and the Attorney General of the Republic of Indonesia. This study aims to find out and analyze the process of handling electoral crimes through Gakumdu and the effectiveness of election criminal settlement through gakumdu centers in the 2019 elections compared to the 2018 regional elections. This research method is using an empirical juridical approach that is evaluative (law is seen as the norm) with the type of research is qualitative. Seriousness in eradicating electoral crimes through the formation of Gakkumdu, consisting of Bawaslu, the State Police of the Republic of Indonesia, and the Attorney General of the Republic of Indonesia (in accordance with its level to the district / city). Bawaslu needs cooperation from the police and prosecutors so that these three agencies support each other in handling violations. This is because the handling of criminal violations elections have lex specialists in handling it especially about time.

Keywords: *elections; money politics; election crimes; gakkumdu*

Abstrak

Pemilu merupakan bentuk nyata dari konsep demokrasi, sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut nya masih terjadi kekurangan-kekurangan. Beberapa sering menjadi sorotan adalah maraknya politik uang dalam setiap pemilihan mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden. Salah satu faktor penyebab maraknya politik uang karena belum adanya kesadaran dari sebagian besar rakyat Indonesia bahwa pemilu merupakan wahana yang paling efektif bagi penegakan kedaulatan rakyat. Hal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang ancaman sanksinya sudah tegas. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan Gakkumdu. Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penanganan pidana pemilu melalui Gakumdu dan efektivitas penyelesaian pidana pemilu melalui sentra Gakumdu pada Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pilkada 2018. Metode penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat evaluatif (hukum dilihat sebagai norma) dengan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Keseriusan dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan Gakkumdu, terdiri dari Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (sesuai dengan tingkatannya hingga kabupaten/kota). Bawaslu membutuhkan kerja sama dari kepolisian dan kejaksaan agar ketiga lembaga ini saling mendukung satu sama lain dalam melakukan penanganan pelanggaran. Hal ini karena penanganan pelanggaran pidana Pemilu memiliki lex spesialis dalam penanganannya terutama soal waktu.

Kata Kunci: pemilu; politik uang; tindak pidana pemilu; gakkumdu

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia, sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilu harus diselenggarakan dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali." Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengatur bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri." Oleh karena itu dibentuklah sebuah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemilu. Kemandirian Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu

mempunyai peran yang penting untuk mencapai tujuan pemilu yang demokratis.

Penyelenggaraan pemilu dilakukan pertama kali pada tahun 1971 dengan dibentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 Golkar, PDI, dan PPP menempatkan wakil-wakilnya sebagai anggota LPU, tapi Perwakilan Golkar mendominasi susunan penyelenggara pemilu sehingga selama 6 kali pemilu Golkar selalu menjadi partai pemenang. Kemenangan Golkar yang berulang-ulang tersebut membuat public curiga bahwa penyelenggaraan pemilu pada saat itu tidak demokratis dengan bukti banyaknya praktik manipulasi suara, atas dasar ketidakpercayaan tersebut muncul wacana public untuk membentuk pengawas pemilu (N. Huda, 2017). Keberadaan lembaga pengawas ini untuk mengawasi jalannya pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran. Pengawas pemilu pertama kali muncul ada tahun 1982 yang dikenal dengan panitia pengawas pelaksanaan pemilu (Panwaslak). Namun posisi panwaslak dalam struktur penyelenggara pemilu masih belum jelas. Panwaslak harus bertanggung jawab kepada ketua panitia pemilihan umum (pada saat itu bernama Lembaga Pemilihan Umum) sesuai dengan tingkatannya. Panwaslak ada ditingkat pusat hingga tingkat kecamatan.

Dalam empat kali pelaksanaan Pemilu pasca-Reformasi di tahun 1998, keorganisasian pengawas Pemilu mengalami beberapa kali perubahan. Pada Pemilu di tahun 1999 dan 2004, organisasi pengawas Pemilu dinamai Panwaslu yang bersifat sementara (*ad hoc*) (Suswantoro, 2016). Setelah mencermati kompleksitas pengaturan lembaga Penyelenggara Pemilu dan melihat banyaknya masalah Pemilu akibat ketidakprofesionalan penyelenggara Pemilu, DPR terdorong untuk menyusun RUU Penyelenggara Pemilu telah mengalami perubahan dengan dibentuknya Komisi Pemilihan Umum tahun 1999. Selain itu untuk meningkatkan transparansi penyelenggara pemilu maka dibentuklah lembaga pengawasan pemilu (*panwaslu*) pada tahun 1999. Kelembagaan pengawasan pemilu mulai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga pengawas pemilihan umum yang bersifat *ad hoc* yang secara fungsional terlepas dari struktur Komisi Pemilihan Umum, dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga pengawasan pemilu yang bersifat tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Di tingkat Panwas

Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Desa, Pengawas TPS, masih bersifat ad hoc.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu yaitu :

- 1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN bersifat ad hoc.
- 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat ad hoc.
- 3) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibukota negara

Pengaturan mengenai pelanggaran dalam pemilihan umum sifatnya *lex specialist* jika dibandingkan dengan pengaturan lainnya, termasuk tentang hukum pidana. Dalam konteks pengaturan tindak pidana, undang-undang pemilu merupakan undang-undang khusus (*lex specialist*). Secara umum perbuatan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu, tata cara penyelesaiannya mengacu kepada KUHAP. Karena menganut asas *lex specialist derogate lex generalis*, maka aturan dalam undang-undang pemilu lebih utama).

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penanganan pidana pemilu melalui Gakumdu pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten pada Pemilu tahun 2019 dan efektivitas penyelesaian pidana pemilu melalui sentra Gakumdu pada Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pilkada 2018.

Penelitian terdahulu yang relevan adalah muhammad ade afriansyah dan betra sarianti, dengan judul Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakumdu (Studi Kasus Bawaslu Kota Bengkulu), Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa tindak pidana pemilu terdapat banyak dan jenisnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilihan umum dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) pasal yang mengatur jenis tindak pidana pemilu, hal tersebut dipandang perlu untuk dilakukannya penegakan hukum bagi yang melanggar, penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu (sentragakumdu) merupakan satu langkah yang dianggap efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana pemilihan umum, karena pada prinsipnya sentra gakumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penegakan tindak pidana pemilu belum dapat memberikan pengaruh yang besar untuk menekan angka tindak pidana pemilu, sebab hal tersebut terlihat dari peraturan hukum terkait tindak pidana pemilu yang masih memberikan kejelasan arti maupun kata-kata mengakibatkan

kesipangsiuran dalam penafsiran, serta moralitas para penegak hukum yang masih tebang pilih dalam penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum pula masih rendah terkait tindakan pidana pemilu.

Penelitian lainnya dijadikan sumber rujukan yaitu yang dilakukan oleh Sarah Bambang, Sri Setyadi, Aref Darmawan, dengan judul "Tindak Pidana Pemilihan Umum Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Pelanggaran". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem Penanganan tindakan pidana pemilihan ini sangat membutuhkan perbaikan dan dibenahkannya supaya menjadi sistem yang efektif dan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik yang nantinya menjadikan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Dimana perbaikannya dalam regulasi nya, dikuatkan kapasitas dan kompetensi profesionalitas para penegak hukum dan perlu adanya kesadaran hukum oleh para pihak yang memiliki kepentingan pemilihan umum, dengan begitu sistem penegakkan pemilu akan berjalan dengan semestinya. Kebaruan dari penelitian ini adalah Efektivitas penyelesaian Tindak Pidana Pemilu oleh Gakumdu Pada UU 15 Tahun 2015 belum ada pengaturan tentang tugas penyampaian dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu. Di UU 7 Tahun 2017, secara eksplisit disebutkan bahwa Bawaslu bertugas untuk menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pasal 93 huruf I UU 7 Tahun 2017. Hal pokok yang penting, berkaitan tugas serta kewenangan Bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Money Politics yang Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Gakumdu sangat efektif sebagai penegakan dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan kewenangan pemilu yang selama ini kewenangan Bawaslu. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat evaluatif (hukum dilihat sebagai norma), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan dengan kata-kata yang berdasarkan kasus yang terjadi, yaitu penanganan tindak pidana pemilu melalui Gakumdu pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR. Pengumpulan datanya yaitu dengan studi lapangan dan pustaka guna memperoleh data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Namun dalam perjalanannya demokrasi pemilu di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan dalam pelaksanaan pemilu memang hal yang wajar. Dengan berbagai perubahan sistem demokrasi pemilu di Indonesia, rakyat berharap bahwa dengan perubahan tersebut dapat ditemukan bentuk ideal dari sistem pemilu.

Sukarna mengutip pendapat Abraham Lincoln yang menegaskan bahwa *Democracy is government from the people by the people and for the people*. Dengan demikian dalam sistem demokrasi ini rakyatlah yang memegang kekuasaan sebab pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Adibowo, 2010).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kartini Kantono yang mengemukakan bahwa “Demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil alih bagian dalam pemerintahan”. Demokrasi sebagai suatu gejala masyarakat yang berhubungan erat dengan perkembangan negara, mempunyai sifat yang berjenis-jenis. Masing-masing seperti terlihat dari sudut kemasyarakatan yang ditinjaunya (Kartono, 1989).

Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikuti sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahnya. Disamping itu, dalam negara dengan penduduk jutaan, para warga negara mengambil bagian juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam media massa (Hakim, 2011).

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang baik, pemerintah telah membuat Undang-undang pemilu, namun tidak dapat disangkal bahwa dalam pelaksanaannya masih ada pelanggaran-pelanggaran yang memiliki dimensi hukum penting bahkan dapat masuk ke dalam tindak pidana pemilu.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aspek hukum dalam pemilu selalu mengalami dinamika hukum, hal ini tidak terlepas dari bergantinya peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu seiring dengan dinamika penyelenggara pemilu dalam setiap periode waktu tertentu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pemilihan Umum merupakan kodifikasi berbagai Undang-undang yang berhubungan dengan Pemilu yaitu Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu.

A. Batasan Tindak Pidana Pemilu

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Pemilu sebenarnya sudah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Peraturan Pemilu. Namun, dalam berbagai undang-undang tersebut belum diatur secara khusus definisi dari Tindak Pidana Pemilu. Bahkan, hingga saat ini tidak ada definisi yang tegas diberikan oleh suatu aturan perundang-undangan. Karena itu untuk memberikan batasan tentang definisi Tindak Pidana Pemilu, penulis mengutip beberapa pendapat ahli.

Menurut Djoko Prakoso tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu (Prakoso, 1987).

Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Maka (Santoso, 2006) memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:

- 1) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
- 2) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
- 3) Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, kerusakan dan sebagainya).

Abdul Fickar Hadjar memberikan definisi Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana tertentu yang disebut dalam ketentuan pidana dalam Peraturan Pemilu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemilu, meliputi tindakan atau kelalaian, yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum (Hadjar, 2008).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, pendapat Djoko Prakoso merupakan definisi yang paling sempit, sekaligus paling tegas dan fokus, yaitu hanya tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Saja. Dengan cakupan itu, maka akan dengan mudah memahami dan mencari tindak pidana pemilu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilu (U. N. Huda, 2020).

Dengan perkembangan politik sebagai akibat tuntutan dan kebebasan dalam berdemokrasi, rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu di dalam KUHP dirasakan sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat. Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di Indonesia, dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selama ini, ternyata tatacara dan mekanisme pemilu juga ikut mempengaruhi perubahan tingkah laku baik peserta, pelaksana, penyelenggara pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan peradilan yang menjadi objek rumusan tindak pidana pemilu, sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang secara garis besar dikelompokkan dalam beberapa kualifikasi perbuatan (Indonesia, 2014), seperti:

- a) Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang
- b) Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh petugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN
- c) Perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksana kampanye
- d) Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan.
- e) Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara/pejabat pemerintah dan lembaga peradilan
- f) Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara.

Pengelompokan jenis-jenis tindak pidana pemilu dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu:

1. TP Pemilu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta mulai dari Pasal 488 s/d Pasal 490.
2. TP yang berkaitan dengan kampanye pemilu, dana kampanye maupun larangan-larangan dalam kampanye yaitu mulai Pasal 491 s/d Pasal 500.

3. TP yang berkaitan dengan pemungutan suara/pencoblosan suara yaitu mulai Pasal 501 s/d Pasal 553.

B. Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang pemilu (IDEA, 2020). Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting, maka undang-undang harus mengatur proses pemilu, pencegahan dari praktek curang atau pelanggaran pemilu. Tujuan penyusunan peraturan pelanggaran pemilu untuk melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat), lembaga penyelenggara pemilu dan pemilih. Ketentuan pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran.

Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah. Hasil Kajian Pengawas Pemilu terhadap berkas dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir Model A.8 dikategorikan sebagai:

- 1) Pelanggaran Pemilu/pemilihan;
Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud berupa:
 - a) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
 - b) Pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau
 - c) Tindak pidana Pemilu.
- 2) Bukan pelanggaran Pemilu/pemilihan; atau
- 3) Sengketa Pemilu/pemilihan.

Dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu yang bersifat pidana tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui Kepolisian yang diteruskan ke Kejaksaan dan bermuara di Pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu, tata cara penyelesaiannya mengacu kepada KUHAP. Karena menganut asas *lex specialist derogate lex generali*, maka aturan dalam undang-undang pemilu lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama, maka ketentuan yang diatur dalam KUHP dan KUHAP menjadi tidak berlaku. Dalam proses pengawasannya Bawaslu RI beserta jajaran ke bawahnya melakukan tugas mengawasi, mencatat dan melaporkan. Melakukan kajian atas temuan atau laporan adanya dugaan pelanggaran dan meneruskannya kepada institusi yang berwenang.

Salah satu hal khusus dalam penanganan tindak pidana pemilu dari tindak pidana umum lainnya adalah adanya peran Bawaslu sebagai pintu gerbang laporan terjadinya pelanggaran pemilu. Apabila masyarakat ada yang mengetahui tentang pelanggaran pemilu. Maka pihak yang menerima

laporan pertama adalah badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri apabila terjadi di luar negeri dan Pengawas Pemilu Tempat Pemungutan Suara, sesuai dengan tugas dan wewenangannya masing-masing. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan bukti bukti sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

Untuk mempercepat proses penanganan Tindak Pidana Pemilu, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Pasal 1 ayat 38 UU No. 7 Tahun 2017 :

Sentra Penegakkan Gakumdu yang selanjutnya disebut Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Dalam PERBAWASLU No.31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Penanganan tindak pidana Pemilu (Pasal 2 ayat (2) asasnya :

- a) keadilan
- b) kepastian
- c) kemanfaatan
- d) persamaan di muka hukum
- e) praduga tidak bersalah
- f) legalitas.

Sedangkan penanganan tindak pidana Pemilu (Pasal 2 ayat (3) prinsipnya :

- a) kebenaran
- b) cepat
- c) sederhana
- d) biaya murah
- e) tidak memihak.

Keanggotaan Gakumdu (Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :

- a) Pengawas Pemilu
- b) Penyidik
- c) Jaksa

Maksud di bentuknya Sentra Gakumdu adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Sedangkan dalam tugasnya Sentra Gakumdu :

- a) Sebagai forum koordinasi antar pihak dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu
- b) Pelaksanaan pola penanganan tindak pidana pemilu
- c) Sebagai pusat data dan informasi tindak pidana Pemilu
- d) Pertukaran data atau informasi
- e) Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana Pemilu

Adapun tujuan dibentuknya Gakumdu :

- 1) Terwujudnya koordinasi dan kerjasama serta sinergitas
- 2) Terwujudnya penegakan hukum tindak pidana pemilu sesuai prinsip peradilan (cepat, sederhana dan biaya ringan) dibatasi oleh waktu yang singkat tidak seperti tindak pidana lainnya.
- 3) Terwujudnya Pemilu sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
- 4) Diharapkan alur komunikasi dan kerjasama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian terkait dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu akan lebih maksimal dalam penanganannya.

Dengan adanya Gakumdu, diharapkan terbangun komunikasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum. Sehingga tindak pidana Pemilu (temuan/laporan) dapat segera diadili dan diberikan kepastian hukum.

Gambar 1.
Materi tentang Sentra Gakumdu, Bimtek Internal Bawaslu
Kab. Sumedang, Sumedang, Desember 2018

Tata cara penanganan tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 Tentang Pemilihan Umum mulai Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 . Sedangkan penanganan tindak pidana pemilu dalam PERBAWASLU RI Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu terdapat dalam Pasal 19 sampai Pasal 32.

- Pasal 19
- Pasal 20
- Pasal 21
- Pasal 22

Dari segi hukum acara, terdapat perkembangan yakni ditentukannya waktu penyelesaian yang singkat mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan waktu-singkat ini dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dari pengaturan pidana pemilu itu sendiri. Tindak pidana pemilu dapat dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya. Karena itu, tindak pidana pemilu harus diselesaikan dalam waktu singkat agar tujuan mengadakan ketentuan pidana pemilu itu dapat tercapai, yakni untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu. Meski demikian,

sebetulnya pembatasan waktu dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terlampau singkat sehingga justru mengakibatkan banyak pelanggaran yang secara materiil terjadi tidak bisa diproses secara lebih lanjut.

C. Contoh Kasus Pidana Pemilu

Pendaftaran berkas : Senin, 10 Des 2019,

Klasifikasi Perkara : Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Nomor Perkara : 1369/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst

Tanggal Surat Pelimpahan : B-1389/0.1.10/Euh.2/12/2018

Penuntut Umum : ANDRI S, SH dan PriyoW., SH.

Terdakwa : 1. Mandala Abadi alias Mandala

2. Lucky Andriyani alias Kiki

Dakwaan : Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI No.07/2017 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 523 ayat (1):

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau meteri lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 240 ayat (1)

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang : Huruf (j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pasal 55 KUHP ayat (1)

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (dader) : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Memahami konsep teoritik deelneming (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni; 1. yang melakukan

2. yang menyuruh lakukan

3. yang turut serta melakukan

4. yang sengaja melakukan

Contoh kasus Mandala Abadi Caleg DPR RI dari PAN, yaitu kasus dugaan pidana pemilu lebih dulu ditangani Sentra Gakkumdu, ada pemeriksaan klarifikasi, ada pembahasan pertama, pemeriksaan kedua. Kalau tidak cukup dihentikan, kalau ada bukti ditindaklanjuti, berpegangan pada Pasal 184 KUHAP. Kasus Mandala Abadi disidangkan setelah Sentra

Gakkumdu mendapatkan alat bukti cukup, Gakkumdu melimpahkannya ke Kejaksaan untuk disidangkan.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjatuhkan vonis atas kasus pidana pelanggaran kampanye pemilu dengan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp 5 juta subsider satu bulan kurungan pada 18 Desember 2018. Mandala Abadi kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada 20 Desember 2018. Pengajuan Banding ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Desember 2018. Tidak ada upaya hukum lain karena Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa putusan pengadilan tinggi sebagai putusan terakhir dan mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 482 ayat (5). Karena sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa mengeksekusi Mandala Abadi pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 di LP Salemba.

Karena terbukti melakukan tindak pidana pemilu yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, maka harus menjalankan sanksi pidananya. Selain itu harus menjalankan sanksi administrasi yaitu dibatalkan sebagai calon, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret Mandala Abadi dari daftar caleg tetap (DCT) DPR RI dari PAN. Karena sudah dalam proses pencetakan surat suara, KPU menerbitkan SK pembatalan Mandala Abadi sebagai caleg terlebih dulu, setelah itu KPU mengirimkan surat kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengumumkan kepada pemilih bahwa Mandala Abadi bukan lagi sebagai caleg DPR RI dari PAN untuk ditempel di TPS. Jika masih ada yang mencoblos Mandala Abadi pada surat suara maka suaranya tidak sah.

D. Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan Gakumdu. Gakumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) secara eksplisit dijelaskan maksud dibentuknya Gakumdu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Informasi yang dirilis Bawaslu untuk penanganan dugaan pelanggaran Pemilu hingga 22 April 2019 (RI, 2019). Bawaslu telah memproses total 7.312 Temuan dan Laporan, terdiri dari :

- 1) Penerimaan laporan dugaan pelanggaran 903 laporan
- 2) Penerimaan temuan dugaan pelanggaran 6.929 temuan

- 3) Laporan/temuan yang telah diregistrasi 7.132 temuan/laporan, terdiri dari :
- 4) Pelanggaran Pidana 343
- 5) Pelanggaran Administrasi 5.167
- 6) Pelanggaran masih dalam proses 88
- 7) Pelanggaran kode etik 121
- 8) Pelanggaran hukum lainnya 696
- 9) Kategori bukan pelanggaran 729

Beberapa putusan diantaranya : 100 Putusan pidana, 84 putusan inkrah, 16 putusan banding/proses. Jenis pelanggaran nya berupa :

- 1) ASN, TNI, POLRI ikut serta sebagai pelaksana kampanye dan tim kampanye : 11 putusan.
- 2) Kampanye iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet diluar jadwal : 2 putusan.
- 3) Kampanye Pemilu diluar jadwal : 2 putusan
- 4) Kepala desa melakukan perbuatan yang menguntungkan peserta Pemilu ; 17 putusan.
- 5) Menggunakan Fasilitas Pemerintah : 6 putusan
- 6) Pelaksana, peserta dan tim kampanye melanggar larangan kampanye : 20 Putusan
- 7) Pelaksana kampanye melibatkan orang yang dilarang untuk kampanye : 4 putusan.
- 8) Pemalsuan dokumen: 13 putusan
- 9) Politik uang : 24 putusan
- 10) Mengacaukan, menghalangi, mengganggu jalannya kampanye : 1 putusan

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan kewenangan besar kepada Pengawas Pemilu dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilu. Kewenangan penanganan pelanggaran itu diberikan kepada pengawas Pemilu, dalam hal ini bawaslu sesuai dengan tingkatannya tetapi ada proses yang harus dilewati, karena pelaksanaan tugas dan kewenangan ini harus bertumpu pada tiga hal, yaitu wewenang, prosedur dan substansi.

Bawaslu membutuhkan kerja sama dari kepolisian dan kejaksaan agar ketiga lembaga ini saling mendukung satu sama lain dalam melakukan penanganan pelanggaran. Hal ini karena penanganan pelanggaran pidana Pemilu memiliki *lex spesialis* dalam penanganannya terutama soal waktu. Singkatnya waktu untuk penyelesaian Pidana Pemilu membutuhkan dukungan dan kesiapan Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Padahal dilihat dari latar belakang komisioner yang duduk di Bawaslu dari tingkat pusat sampai paling bawah tidak semuanya berlatar belakang hukum atau

faham tentang aturan hukum. Bawaslu harus dapat menyiapkan sumberdaya yang kualifikasinya sesuai dengan bidang hukum, selain itu bimtek, pelatihan ataupun bentuk lainnya untuk peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat bekerja secara professional dan berintegritas tinggi khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu.

Dari segi hukum acara, terdapat perkembangan yakni ditentukannya waktu penyelesaian yang singkat mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan waktu singkat ini dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dari pengaturan pidana pemilu itu sendiri. Tindak pidana pemilu dapat dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya. Karena itu, tindak pidana pemilu harus diselesaikan dalam waktu singkat agar tujuan mengadakan ketentuan pidana pemilu itu dapat tercapai, yakni untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu. Meski demikian, sebetulnya pembatasan waktu dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terlampau singkat sehingga justru mengakibatkan banyak pelanggaran yang secara materiil terjadi tidak bisa diproses secara lebih lanjut.

Diperlukan adanya kerjasama dan relasi kelembagaan yang baik antara penyelenggara Pemilu menjadi syarat mutlak untuk menciptakan situasi dan kondisi pelaksanaan Pemilu yang baik. Selain itu adanya partisipasi aktif dari peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih yang berintegritas.. Ketiga elemen ini harus satu tujuan bersama, mewujudkan Pemilu yang demokratis. Elemen penyelenggara Pemilu harus berintegritas, bertindak adil dan objektif. Elemen peserta Pemilu yang terdiri dari Parpol, paslon presiden dan wakil presiden, perseorangan untuk DPD mempunyai integritas dan berkomitmen untuk taat dan tunduk pada peraturan Pemilu, misalnya dengan tidak melakukan politik uang atau politik transaksional. Politik uang adalah akar dari persoalan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, baik penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan pemilih dapat meminimalisir persoalan politik uang.

Dari segi aturan, tugas Bawaslu dalam UU 15 Tahun 2011, pasal 73 ayat (2) Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Sementara itu di UU 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf (b) Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu. Dengan demikian, Dalam UU 7 Tahun 2017 semakin diperjelas bahwa objek pencegahan dan penindakan ialah Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, dimana pada UU 15/2011 hanya dilakukan pada pelanggaran Pemilu saja. Selanjutnya, Pada UU

15/2011 Bawaslu hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye. Sementara, rumusan di UU 7 2017 pasal 93 huruf d angka 5, disebutkan tugas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Dengan demikian, terjadi perluasan atas objek pengawasan yang semula hanya mengawasi pelaksanaan kampanye menjadi mengawasi pelaksanaan kampanye dan Dana Kampanye.

Pada UU 15 Tahun 2015 belum ada pengaturan tentang tugas penyampaian dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu. Di UU 7 Tahun 2017, Secara eksplisit disebutkan bahwa Bawaslu bertugas untuk menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pasal 93 huruf I UU 7 Tahun 2017.. Hal pokok yang penting, berkaitan tugas serta kewenangan Bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Money Politics yang Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Pencegahan Money Politics tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU 15/2011, sementara itu pasal 93 huruf e UU 7 Tahun 2017, disebutkan secara eksplisit mencegah terjadinya praktik politik uang. Dengan demikian UU 7 Tahun 2017 memperkuat tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Money Politics yang Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Selain itu, tugas baru Bawaslu adalah dalam hal pengawasan terhadap ASN, TNI, dan POLRI, dimana tugas ini tidak diatur dalam UU 15 Tahun 2011 desain serta kerangka penegakan hukum pemilu, sebenarnya di UU 7 Tahun 2017 telah dibuat secara lebih lengkap terkait tata cara, mekanisme penegakan hukum pemilu dari UU . Rumusan-rumusan norma UU pemilu dalam hal ini UU 7 Tahun 2017 merupakan rumusan norma yang disusun sebagai bagian dari upaya penyempurnaan UU sebelumnya, dengan didasari bahwa penegakan hukum pemilu yang merupakan unsur utama pemilu demokratis, jujur dan adil tidak akan pernah terwujud jika model penegakan hukumnya lemah. Pertama, tugas dan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga formal/alat Negara untuk mengawasi pemilu diperkuat secara tugas pokok fungsinya, mulai dari kewenangan melakukan pencegahan, penindakan sampai kepada menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan semacam peradilan semu, yaitu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran dan sengketa.

Kesimpulan

Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain

kelembagaan yang terlibat didalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan kewenangan besar kepada Pengawas Pemilu dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilu demi terwujudnya pelaksanaan Pemilu demokratis. Selama penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditemukan berbagai pelanggaran yang mencederai pemilu itu sendiri. Kewenangan penanganan pelanggaran itu diberikan kepada pengawas Pemilu, dalam hal ini Bawaslu sesuai dengan tingkatannya tetapi ada proses yang harus dilewati, karena pelaksanaan tugas dan kewenangan ini harus bertumpu pada tiga hal, yaitu wewenang, prosedur dan substansi.

Keseriusan dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan Gakkumdu, terdiri dari Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (sesuai dengan tingkatannya hingga kabupaten/kota). Bawaslu membutuhkan kerja sama dari kepolisian dan kejaksaan agar ketiga lembaga ini saling mendukung satu sama lain dalam melakukan penanganan pelanggaran. Hal ini karena penanganan pelanggaran pidana Pemilu memiliki *lex spesialis* dalam penanganannya terutama soal waktu. Dari segi hukum acara, terdapat perkembangan yakni ditentukannya waktu penyelesaian yang singkat mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tindak pidana pemilu harus diselesaikan dalam waktu singkat agar tujuan ketentuan pidana pemilu itu dapat tercapai, yakni untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu. Meski demikian, sebetulnya pembatasan waktu dalam UU No. 7 tahun 2017 sangat singkat sehingga justru mengakibatkan banyak pelanggaran yang secara materiil terjadi tetapi tidak dapat diproses lebih lanjut. Adanya keharusan pengadilan untuk memutus perkara pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu, maka paling lambat lima hari sebelum hasil pemilu ditetapkan secara nasional, perkara harus sudah di putus.

Efektivitas penyelesaian Tindak Pidana Pemilu oleh Gakumdu Pada UU 15 Tahun 2015 belum ada pengaturan tentang tugas penyampaian dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu. Di UU 7 Tahun 2017, secara eksplisit disebutkan bahwa Bawaslu bertugas untuk menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pasal 93 huruf I UU 7 Tahun 2017.. Hal pokok yang penting, berkaitan tugas serta kewenangan Bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Money Politics yang Terstruktur Sistematis Massif (TSM).

Kewenangan Bawaslu melakukan pencegahan, penindakan juga sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan semacam peradilan semu, yaitu

menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran dan sengketa. Di tengah proses politik di negeri ini bahwa penegakan hukum yang independen, transparan dan bermartabat menjadi harapan dan dambaan masyarakat. Untuk itu diperlukan bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu.

Bibliografi

- Adibowo, R. (2010). *Demokrasi*. Universitas Komputer Indonesia. [Google Scholar](#)
- Hadjar, A. F. (2008). Perspektif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Hukum Pantarei*.
- Hakim, A. A. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [Google Scholar](#)
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Kencana. [Google Scholar](#)
- Huda, U. N. (2020). *Hukum partai politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia. [Google Scholar](#)
- IDEA, I. (2020). International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, International Institute for Democracy and Electoral Assistance. *Stockholm*.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.
- Kartono, K. (1989). *Pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa*. Bandung: Mandar Maju. [Google Scholar](#)
- Prakoso, D. (1987). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Harapan.
- RI, P. I. B. (2019). *Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019, Bawaslu RI 23 April 2019*.
- Santoso, T. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika. [Google Scholar](#)
- Suswanto, G. (2016). *Mengawal penegak demokrasi di balik tata kelola Bawaslu & DKPP*. Jakarta: Erlangga. [Google Scholar](#)